

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28
- Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1999, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta
- Muhammad Djafar Saidi, 2014, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2013
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, PT Refika Aditama, 2008
- Philipus M. Hadjon, 1999, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005
- R. Soepomo, *Pengantar Manajemen*, Bandung : Yrama Widya, 2018
- Rasyid, Ryas, Et al, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, 2007, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Kencana,

2011

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data

Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

C. JURNAL

Muhammad Irfan Nasution, Nurwani, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan" *JURNAL AKUNTANSI DAN*

KEUANGAN, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2021: <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

Nidya Vitriana, Agustiawan, Muhammad Ahyaruddin, Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, *DIGIBIS : Digital Business Journal*, Volume 1 No. 1 Juli

Natalie Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana juni 2014*, Vol.13 No.2

Abid Muhtarom, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015", *Jurnal Ekonomi Bisnis Edisi Maret 2015*, Vol. 1

D. WEBSITE

Bukittinggikota.go.id, diakses 12.36, 05 Maret 2025

inspektorat.bukittinggikota.go.id, diakses 14.12, 05 Maret 2025

E. LAIN-LAIN

Wawancara penulis dengan bapak Fikry Asyhary, S.Kom. selaku Sub bidang IT Badan Keuangan Kota Bukittinggi , 20 februari 2025

Wawancara penulis dengan Ibu Lola Marisa, SE. selaku Sub bidang Konsolidator pelaporan Badan Keuangan Kota Bukittinggi , 20 februari 2025

Wawancara penulis dengan ibu Feni Febrina, SE, Ak, M.Si. selaku Pengendali Teknis Inspektorat Kota BUkittinggi, 3 Maret 2025, pukul 11.07

